

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA BIRTARIA KASSI DI KABUPATEN JENEPONTO

Nasriah Eka Putri^{1*}, Samsir Rahim², Muhammad Yusuf³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

The purpose of this study was to find out community participation in the development of the Birtaria Kassi tourist attraction in Jeneponto Regency. The method used a qualitative method which explained how the community participates in the development of the Kassi Birtaria tourist attraction in Jeneponto Regency. The research informants were 6 people. Research information was collected through observation, interviews and documentation. The results showed that community participation in the development of the Birtaria Kassi tourist attraction in Jeneponto Regency, seen from the planning had run well, namely the presence and activeness of the community in providing input during the meeting. Furthermore, the management was good where the community participates in the construction of facilities and infrastructure and participates in providing services for tourists. Furthermore, in the utilization stage, the community's economy was increasing.

Keywords: *community participation, tourism object development*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata Birtaria Kassi di Kabupaten Jeneponto. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif yang menjelaskan tentang bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata Birtaria Kassi di Kabupaten Jeneponto. Informan penelitian adalah berjumlah 6 orang. Informasi penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata Birtaria Kassi di Kabupaten Jeneponto, dilihat dari perencanaan sudah berjalan dengan baik yaitu kehadiran serta keaktifan masyarakat dalam memberikan masukan selama diadakannya pertemuan. Selanjutnya dari pengelolaan sudah berjalan dengan baik dimana masyarakat ikut serta dalam pembangunan sarana dan prasarana dan ikut serta dalam memberikan pelayanan bagi wisatawan. Selanjutnya dalam tahap pemanfaatan yaitu perekonomian masyarakat lebih meningkat.

Kata kunci: partisipasi masyarakat, pengembangan objek wisata

* nasriahekaputri@gmail.com

PENDAHULUAN

Masyarakat memiliki peran penting dalam pengembangan. Kedudukan masyarakat disini bukan lah sebagai objek tetapi sebagai subjek. Peran aktif masyarakat dalam pembangunan/pengembangan mulai dari perencanaan hingga pemanfaatan hasil akan menentukan arah keberlanjutan pengembangan itu. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Razak (2013) yang menyatakan pembangunan tidak hanya didominasi oleh pemerintah dan swasta saja, tapi masyarakat juga memiliki kekuatan dalam menentukan arah pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata sangat penting agar objek wisata tersebut dapat berjalan dengan baik dan banyak diminati oleh pengunjung. Keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat dalam pengembangan wisata ini bukan hanya keterlibatan mental semata, tetapi harus disertai mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Aset dan Sumber Daya Alam Daerah Bab IV Pasal 15 Ayat (1) Tahun 2017 menegaskan bahwa “Pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat

dalam pengelolaan aset atau sumber daya alam daerah yang meliputi penggunaan, pemanfaatan, pengamanan serta pemeliharannya.”

Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu wilayah yang mempunyai berbagai potensi agar dijadikan sebagai wisata alam. Pengembangan pariwisata Kabupaten Jeneponto sebagai daerah tujuan wisata yang diunggulkan sebagai destinasi pariwisata daerah provinsi Sulawesi Selatan ini tidak terlepas dari potensi alam, sejarah dan budaya yang cukup dikenal sehingga dalam pengembangannya membutuhkan perhatian khusus dari para *stakeholders* dan tidak terlepas dari masyarakat juga, untuk saling bersinergi satu sama lain.

Akan tetapi masih banyak objek wisata yang terbengkalai salah satunya yang berada di Kelurahan Tonro Kassi Barat Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto terdapat potensi wisata alam yang bernama Objek Wisata Birtaria Kassi dimana disana terdapat pesisir pantai yang indah, kolam renang, arena bermain keluarga, villa, gazebo serta sarana olahraga. Sehingga dapat dijadikan sebagai tempat untuk berlibur dengan keluarga sambil menikmati suasana alam yang indah

Wisata Birtaria Kassi ini harus dikembangkan karena pengembangan sektor wisata adalah salah satu tindakan

yang realistis serta logis, mengingat bahwa ini akan memberikan dampak positif, diantaranya dapat memperluas kesempatan usaha serta meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong terpeliharanya keamanan serta keterlibatan.

Objek wisata Birtaria Kassi awalnya merupakan lahan yang dimiliki oleh salah satu masyarakat setempat yaitu bapak Syamsuddin DL., Kr. Lau seluas kurang lebih 5 hektar yang dikontrak Pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto selama 25 tahun. Disini dapat dilihat bahwa sangat besarnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan objek wisata tersebut. Akan tetapi dilihat dari kondisi sekarang, partisipasi masyarakat mulai menurun baik dalam pemberian tenaga ataupun dalam pemberian sumbangan lainnya.

Mardikanto (2003: 25), menyatakan bahwa partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian: kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Sedangkan menurut Theodorson dalam Mardikanto (2010), bahwa dalam pengertian sehari-hari, partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang/individu/masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu.

Menurut Halimah dkk (2015), ia mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara aktif dalam segala proses dengan dasar kesadaran serta tanggung jawab dalam mencapai tujuan bersama.

Menurut Adiyoso (2009), dalam Dewi (2013) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat adalah hal yang paling penting dalam proses pemberdayaan serta usaha pertumbuhan kemandirian.

Menurut Porawouw (2005) dalam Haq dkk (2021) mendefinisikan bahwa partisipasi masyarakat adalah suatu proses aktif dimana penduduk desa secara langsung ikut serta dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek atau program pembangunan yang mereka miliki dengan tujuan untuk menumbuhkan kemandiriannya, meningkatkan pendapatannya dan pengembangan.

Menurut Kusmanto (2014), partisipasi masyarakat merupakan kegiatan sekelompok orang yang ikut aktif dalam suatu pembangunan yang terdiri dari tenaga, *skill*, serta fasilitas yang dimilikinya.

Menurut Eckerd dan Heidelberg (2020), partisipasi masyarakat dipandang sebagai kesempatan dalam mendidik masyarakat tentang sebuah

hal dengan membangun sebuah dukungan.

Tipologi partisipasi masyarakat menurut Pretty dalam Kalesaran dkk (2015) memiliki tujuh tingkatan berbeda, mulai dari partisipasi pasif hingga ke mobilisasi sebagai berikut: 1. Partisipasi Pasif. Masyarakat berpartisipasi melalui pesan yang disampaikan mengenai apa yang akan terjadi dan apa yang telah terjadi. Penyampaian pesan ini adalah sepihak oleh administrator atau pemimpin proyek tanpa mendengar tanggapan masyarakat. Informasi yang dibagikan hanya milik profesional luar (bukan masyarakat); 2. Partisipasi Informatif. Masyarakat berpartisipasi dengan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dengan menggunakan pertanyaan survey atau pendekatan serupa. Mereka tidak mempunyai kesempatan untuk terlibat dalam proses, seperti temuan riset yang tidak bisa dibagi atau dicek kebenarannya; 3. Partisipasi melalui konsultasi. Masyarakat berpartisipasi dengan dikonsultasikan dan orang luar mendengar pendapat mereka. Professional luar ini mendefinisikan problem dan solusinya, dan memodifikasi sesuai dengan respon masyarakat. proses konsultasi ini tidak melibatkan dalam proses pengambilan

keputusan, dan professional luar tidak berkewajiban menampung aspirasi masyarakat; 4. Partisipasi karena insentif material. Masyarakat berpartisipasi dengan memberi sumber daya seperti tenaga dengan imbalan makanan, uang atau bentuk insentif lain. Pendekatan ini banyak digunakan dalam pengelolaan lahan pertanian termasuk dalam kategori ini, petani menyediakan lahan tetapi tidak terlibat dalam proses eksperimen dan pembelajaran. Peran serta seperti ini biasa terlihat tapi penduduk tidak punya kepentingan lagi untuk memperpanjang aktivitas ini begitu insentifnya habis; 5. Partisipasi Fungsional. Masyarakat berpartisipasi dengan membentuk kelompok untuk memenuhi tujuan yang berkaitan dengan proyek, atau menginisiasi organisasi sosial dari luar. Keterlibatan seperti ini cenderung tidak terjadi pada tahap awal siklus proyek atau perencanaan atau setelah keputusan besar dibuat. Keterlibatan seperti ini cenderung tergantung pada fasilitator dan orang luar, walaupun mungkin nantinya bisa berubah menjadi mandiri; 6. Partisipasi Interaktif. Masyarakat berpartisipasi melalui pengamatan bersama, yang ditujukan pada penyusunan rencana kerja dan pembentukan organisasi lokal yang baru atau memperkuat lembaga yang ada. Ini

cenderung melibatkan metodologi antar disiplin ilmu yang berasal dari berbagai perspektif dan mempergunakan proses pembelajaran sistematis dan terstruktur. Kelompok ini mengambil kendali atas keputusan, sehingga masyarakat dapat mempertahankan struktur-struktur atau prakteknya; 7. Mobilisasi diri. Masyarakat berpartisipasi dengan berinisiatif tanpa ketergantungan pada lembaga luar untuk mengubah sistem. Mereka mengembangkan kontak dengan institusi luar untuk sumberdaya dan saran-saran yang mereka perlukan tapi tetap mempertahankan kontrol atas penggunaan sumberdaya tersebut. Mobilisasi dan cara kerja kolektif seperti ini dapat atau tidak menyelesaikan ketimpangan distribusi baik terhadap kekayaan atau kekuasaan yang ada. Masyarakat membentuk sebagai bagian proyek setelah ada keputusan utama yang disepakati. Pada tahap awal, masyarakat tergantung pada pihak luar.

Masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi sedangkan orang luar mendengarkan, serta menganalisis masalah dan pemecahan dalam pola belum ada peluang untuk pembuatan keputusan bersama. Para profesional tidak berkewajiban untuk mengajukan pandangan masyarakat (sebagai masukan) untuk ditindaklanjuti.

Disini masyarakat hanya menjawab pertanyaan untuk proyek, namun tidak berkesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses keputusan. Akurasi hasil studi tidak dibahas bersama masyarakat.

Arnstain dalam Ramadhan dan Khadiyanto (2014), mendeskripsikan delapan tingkatan dalam partisipasi masyarakat, yaitu: *manipulation, therapy, informing, consultation, placation, partnership, delegated power* dan *citizen control*. Delapan tingkatan ini memiliki arti dan ciri masing-masing. Sheery juga membagi 8 tingkatan ini menjadi 3 kelompok besar yaitu *nonparticipation, tokenism* dan *citizen power*.

Tingkat pertama dalam tangga partisipasi Arnstain adalah manipulasi (*manipulation*) dalam tahap ini karakteristik paling menonjolnya adalah fungsi pelibatan masyarakat hanyasebagai pelegalan kekuasaan.

Tangga selanjutnya adalah terapi (*therapy*) dalam tahap ini pelibatan masyarakat hanyadengan tujuan pembelajaran sehingga tidak ada tindak lanjut dari pelibatan tersebut.

Tangga ketiga adalah informaing posisi masyarakat dalam tahap ini masih dilibatkan secara pasif yaitu hanya diinformasikan saja.

Selanjutnya tangga partisipasi keempat yaitu konsultasi (*consultation*) pada tahap ini masyarakat tidak hanya diinformasikan namun lebih jauh ada kegiatan konsultasi antara pemerintah dan masyarakat.

Pada tahap kelima yaitu penempatan perwakilan (*placation*) pada tahap ini masyarakat mempunyai hak untuk menempatkan perwakilannya di pemerintahan.

Pada tahap keenam atau disebut tahap kemitraan (*partnership*) posisi pemerintah dan masyarakat menjadi setara dalam kewenangan dan tanggung jawab.

Pada tahap ketujuh yaitu tahap pendelegasian kekuasaan (*delegated power*) pemerintah sudah mendelegasikan kekuasaannya pada masyarakat sehingga kewenangan masyarakat lebih tinggi.

Pada tahap kedelapan atau tahap masyarakat berkuasa (*citizen control*) fungsi pemerintah semakin sedikit dan mayoritas kewenangan dan tanggung jawab ada pada masyarakat (Ramadhan dan Khadiyanto, 2014).

Pengertian pengembangan menurut J.S Badudu (2003), dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, memberikan definisi pengembangan adalah hal, cara atau hasil kerja mengembangkan. Sedangkan

mengembangkan berarti membuka, memajukan, menjadikan maju dan bertambah baik.

Objek wisata adalah suatu karya manusia, sejarah bangsa/wilayah, tata seni budaya serta keindahan alam ciptaan tuhan yang memiliki daya tarik Chafid Fandeli (1995).

Selanjutnya, SK Departement Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi No.KM98/PW: 102/MPPT-87, menjelaskan bahwa “Objek wisata adalah suatu daerah/wilayah yang dimana alamnya dijadikan sebagai daya tarik dan dikembangkan lagi oleh ide manusia”.

Jadi objek wisata adalah sebuah tempat yang dimana menyimpan SDA yang dibuat menarik sehingga dikunjungi oleh para wisatawan serta adanya fasilitas pendukung.

Sedangkan objek wisata alam adalah objek wisata yang daya tariknya bersumber pada keindahan sumber daya alam dan tata lingkungannya.

Menurut Mappi dalam kalebos (2016) Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata. Seorang wisatawan berkunjung kesuatu tempat/daerah/Negara karena tertarik oleh sesuatu yang menarik dan

menyebabkan wisatawan berkunjung ke suatu tempat/daerah/negara disebut daya tarik dan atraksi wisata.

Jenis Objek Wisata Penggolongan jenis objek wisata akan dari ciri-ciri khas yang ditonjolkan oleh tiap-tiap objek wisata. Menurut Mappi (2001:30-31) objek wisata dikelompokkan ke dalam tiga jenis, yaitu:

Objek wisata alam, misalnya: laut, pantai, gunung (berapi), danau, sungai, fauna (langka), kawasan lindung, cagar alam, pemandangan alam dan lain-lain.

Objek wisata budaya, misalnya: upacara kelahiran, tari-tari (tradisional), musik (tradisional), pakaian adat, perkawinan adat, upacara turun ke sawah, upacara panen, cagar budaya, bangunan bersejarah, peninggalan tradisional, festival budaya, kain tenun (tradisional), tekstil lokal, pertunjukan (tradisional), adat istiadat lokal, museum, dan lain-lain.

Objek wisata buatan, misalnya: sarana dan fasilitas organisasi, permainan (layangan), hiburan (lawak atau akrobatik, sulap), ketangkasan (naik kuda), taman rekreasi, taman nasional, pusatpusat perbelanjaan dan lain-lain. Dalam membangun objek wisata tersebut harus memperhatikan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat, sosial budaya daerah setempat, nilai-nilai agama, adat

istiadat, lingkungan hidup, dan objek wisata itu sendiri. Pembangunan objek dan daya tarik wisata dapat dilakukan oleh Pemerintah, Badan Usaha maupun Perseorangan dengan melibatkan dan bekerjasama pihak-pihak yang terkait.

METODE

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Yang dimana jenis penelitian ini menjelaskan mengenai suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata, tulisan serta lisan dari pelaku yang dapat diamati. Adapun tipe penelitian ini adalah *fenomenologi*, yaitu suatu penelitian yang dilakukan melalui pemaparan dan pengalaman yang dialami oleh informan dengan didukung data kualitatif, dimana peneliti berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta tertentu dan memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan dan permasalahan yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi masyarakat adalah partisipasi yang aktif, yaitu dalam (a) Partisipasi dalam Tahap Perencanaan (b) Partisipasi dalam Tahap Pengelolaan (c) Partisipasi dalam Tahap Pemanfaatan.

Partisipasi dalam Tahap Perencanaan

Partisipasi dalam tahap perencanaan merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan potensi masyarakat dalam merencanakan pembangunan yang berkaitan dengan potensi sumber daya lokal berdasarkan kajian musyawarah, yaitu peningkatan aspirasi berupa keinginan dan kebutuhan nyata yang ada dalam masyarakat melalui usulan, saran dan kritik serta kehadiran masyarakat dalam musyawarah. Peningkatan keaktifan dan peran serta kelompok masyarakat dalam proses pembangunan, dan peningkatan rasa memiliki pada kelompok masyarakat terhadap kegiatan yang telah disusun.

Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan dengan memberikan usulan-usulan mengenai program, keaktifan memberikan saran dan kritik serta tingkat kehadiran masyarakat dalam pertemuan terkait dengan musyawarah rencana pembangunan.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan dilakukan melalui tahapannya seperti melakukan serta memberikan usulan usulan pada saat diadakannya suatu pertemuan, karena dari hasil pertemuan tersebut akan

diprioritaskan hal hal yang sangat penting dari setiap masyarakat yang ikut.

Pengamatan peneliti di lapangan melihat bahwa partisipasi masyarakat dalam memberikan kritik dan saran terkait dalam proses perencanaan pengembangan objek wisata Birtaria Kassi sangat tinggi, peneliti melihat masyarakat aktif memberikan kritik dan saran saat dilakukan pra rapat, begitupun pada saat pelaksanaan Rapat tingkat partisipasi yang terlihat meningkat karena masyarakat antusias terhadap pelaksanaan rapat, bahkan menurut masyarakat bahwa mereka yang datang ke pelaksanaan rapat di Kelurahan Tonrokassi Barat yaitu untuk memberikan kritik dan saran yang sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil dan uraian yang dikemukakan terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pemberian kritik dan saran dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pengembangan disimpulkan bahwa masyarakat aktif dalam memberikan kritik dan saran.

Selain melihat tingkat partisipasi masyarakat dari pemberian usul-usul, kritik dan saran dalam pertemuan tersebut maka selanjutnya dapat dilihat partisipasi masyarakat terkait dengan tingkat kehadirannya dalam pertemuan.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam hal kehadirannya di tempat pelaksanaan rapat sudah menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kehadiran yang maksimal, artinya masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan rapat tersebut. Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa masyarakat berpartisipasi baik dalam Musyawarah rapat sehingga pelaksanaannya juga menghasilkan perencanaan-perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Partisipasi dalam Tahap Pengelolaan

Adapun yang dimaksud partisipasi masyarakat dalam tahap pengelolaan pada penelitian ini yaitu suatu kegiatan yang dilakukan guna mencapai suatu perencanaan yang sebelumnya disusun. Adapun bentuk dari pelaksanaan yaitu, masyarakat ikut berkontribusi dalam pelaksanaan pengembangan tersebut baik berupa tenaga maupun uang.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan menunjukkan bahwa masyarakat dilibatkan secara aktif dalam tahap pengelolaan, baik itu dalam bentuk tenaga maupun materi karena dalam tahap pengelolaan pengembangan ini akan berhasil jika di

dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak atau *stakeholders* di lingkungan setempat.

Partisipasi dalam Tahap Pemanfaatan

Untuk tercapainya keberhasilan pembangunan masyarakat maka segala program perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan pengembangan harus melibatkan masyarakat, karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya sebab merekalah nantinya yang akan memanfaatkan dan menilai tentang berhasil atau tidaknya pengembangan di objek wisata Birtaria Kassi tersebut. Adapun partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil pengembangan dalam penelitian ini adalah tentang keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan pengemabnayang direncanakan serta partisipasi masyarakat dalam tahap pemanfaatan.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa partisipasi masyarakat Kelurahan Tonrokassi Barat dalam tahap pemanfaatan hasil menunjukkan bahwa masyarakat dilibatkan, ini artinya bahwa masyarakat dapat memanfaatkan hasil pembangunan di Kelurahan Mamboro karena hal tersebut merupakan hasil dari aspirasi

masyarakat yang telah diusulkan. Hal itu menunjukkan bahwa masyarakat memiliki partisipasi dalam memanfaatkan hasil pengembangan.

KESIMPULAN

Partisipasi dalam tahap perencanaan, pada aspek ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata sudah berjalan dengan baik, ini dapat kita lihat dalam keikutsertaan masyarakat dalam memberikan masukan masukan terkait dengan pengembangan tersebut. Serta keaktifan masyarakat dalam mengahdiri pertemuan pertemuan yang diadakan guna dalam melakukan perencanaan tersebut.

Partisipasi dalam tahap pengelolaan, dalam hal ini juga sudah berjalan dengan baik yang dimana masyarakat ikut serta dalam memberikan bantuan, baik itu berupa tenaga, pikiran maupun materi.

Partisipasi dalam tahap pemanfaatan, dalam tahap pemanfaatan ini hal yang dirasakan oleh masyarakat yaitu perekonomian lebih meningkat serta objek wisata Birtaria Kassi ini lebih terawat.

REFERENSI

- Adiyoso. (2009). *Menggugat Perencanaan Partisipasif dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Surabaya: ITS Press.
- Chafid, F. (1995). *Dasar Dasar Manajemen Kepariwisata Alam*. Yogyakarta: Liberty.
- Dewi, M. H. U. (2013). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan Bali. *Jurnal Kawistara*, 3(2), pp. 129–139. <https://doi.org/10.22146/kawistara.3976>
- Eckerd, A., & Heidelberg, R. L. (2020). Administering Public Participation. *American Review of Public Administration*, 50(2), pp. 133–147. <https://doi.org/10.1177/0275074019871368>
- Halimah, M., Krisnani, H., & Fedryansyah, M. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pengelolaan Sampah. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2). <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.13272>
- Yanty, N., Nasrulhaq, N., & Mahsyar, A. (2021). Participatory Governance dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Kelurahan Manggala Kota Makassar. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(4), pp. 1259–1272.
- Kalebos, F. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan wisatawan yang berkunjung ke Daerah Wisata Kepulauan. *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*, 4(3).
- Kalesaran, F., Rantung, V. V., & Pioh, N. R. (2015). Partisipasi Dalam Program Nasional Kelurahan Taas Kota Manado. *E-Journal Acta Diurna*, IV(5), pp. 1–13.

- Kusmanto, H. (2014). Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA Partisipasi Masyarakat dalam Demokasi Politik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, 2(1), pp. 78–90. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>
- Razak, A. R. (2013). Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), pp. 10–15. <https://doi.org/10.26618/ojip.v3i1.54>